

RUDYCT ACADEMIC SERIES 2026

Oligarki, Elite, dan Rakyat: Struktur Kekuasaan Indonesia

*Telaah Ekonomi Politik tentang Konsentrasi Sumber Daya,
Institusi Demokrasi, dan Daya Tawar Warga*

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Bogor, Indonesia • Juli 2026



Abstrak

Artikel ini menganalisis struktur kekuasaan Indonesia melalui hubungan dinamis antara oligarki, elite, dan rakyat. Oligarki dipahami bukan sekadar kumpulan orang kaya, melainkan pola pertahanan kekayaan dan pengaruh yang memungkinkan sumber daya material dikonversi menjadi kekuasaan politik. Elite mencakup aktor partai, birokrasi, bisnis, keamanan, media, hukum, akademik, dan organisasi sosial yang memiliki akses tidak seimbang terhadap proses pengambilan keputusan. Rakyat tidak ditempatkan sebagai massa pasif, tetapi sebagai warga negara yang kekuatannya muncul melalui suara, organisasi, pengetahuan, solidaritas, protes, konsumsi, dan pengawasan. Dengan pendekatan ekonomi politik historis-institusional, artikel menjelaskan kesinambungan kekuasaan dari Orde Baru menuju demokrasi pasca-Reformasi, peran biaya politik, kartelisasi partai, dinasti, desentralisasi, media digital, ekstraktivisme, kebijakan sosial, serta hubungan pusat-daerah. Argumen utamanya ialah bahwa demokratisasi telah memperluas kompetisi dan kebebasan, tetapi belum sepenuhnya mendemokratisasi distribusi sumber daya yang menentukan siapa dapat memasuki arena politik dan memengaruhi kebijakan. Karena itu, pembaruan demokrasi memerlukan reformasi pembiayaan politik, transparansi kepemilikan dan lobi, penguatan negara hukum, demokratisasi partai, perlindungan ruang sipil, media independen, serta perluasan kapasitas sosial-ekonomi warga. Jalan keluarnya bukan mengganti satu elite dengan elite lain, melainkan membangun institusi yang membuat kekuasaan dapat diawasi, dipertanggungjawabkan, dibatasi, dan diperebutkan secara adil.

Kata Kunci: oligarki; elite; rakyat; demokrasi; ekonomi politik; elite capture; partai politik; dinasti politik; negara hukum; Indonesia

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Paradoks Demokrasi dan Konsentrasi Kekuasaan
2. Kerangka Konseptual: Oligarki, Elite, dan Kekuasaan
3. Genealogi Historis Struktur Kekuasaan Indonesia
4. Arsitektur Kekuasaan Formal dan Informal
5. Biaya Politik, Partai, dan Pasar Pencalonan
6. Oligarki Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Kebijakan Publik
7. Dinasti Politik dan Reproduksi Elite
8. Birokrasi, Aparat, dan Teknokrasi
9. Media, Platform Digital, dan Produksi Persetujuan
10. Rakyat sebagai Aktor: Dari Pemilih menuju Warga Negara
11. Politik Identitas, Populisme, dan Patronase
12. Desentralisasi, Elite Lokal, dan Ketimpangan Wilayah
13. Hukum, Korupsi, dan Akuntabilitas
14. Membaca Kebijakan melalui Lensa Distribusi Kekuasaan

15. Kelas Menengah, Profesional, dan Elite Pengetahuan
16. Gender, Generasi, dan Kelompok yang Kurang Terwakili
17. Perbandingan dan Pelajaran dari Negara Demokrasi Lain
18. Indikator untuk Mendiagnosis Konsentrasi Kekuasaan
19. Studi Kasus Analitis: Bagaimana Struktur Bekerja
20. Strategi Warga dan Etika Kepemimpinan Demokratis
21. Agenda Reformasi: Mendemokratisasi Sumber Daya Kekuasaan
22. Skenario Masa Depan Demokrasi Indonesia
23. Kesimpulan

1. Pendahuluan: Paradoks Demokrasi dan Konsentrasi Kekuasaan

Indonesia adalah demokrasi elektoral besar dengan pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum, pers yang relatif plural, masyarakat sipil yang hidup, serta ruang partisipasi yang jauh lebih terbuka dibandingkan masa otoritarian. Namun demokrasi prosedural itu berjalan beriringan dengan konsentrasi kekayaan, biaya politik yang tinggi, dominasi elite partai, ketergantungan kandidat pada penyandang dana, dan ketimpangan akses warga terhadap pengambilan keputusan. Paradoks ini membuat pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya berkuasa tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk lembaga formal. Konstitusi menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaan kedaulatan selalu melewati organisasi, modal, pengetahuan, jaringan, dan institusi. Mereka yang menguasai sumber daya tersebut memiliki peluang lebih besar untuk menentukan agenda, mendefinisikan masalah, dan membatasi pilihan kebijakan.

Judul “Oligarki, Elite, dan Rakyat” menunjuk tiga lapis analisis. Oligarki menerangkan konsentrasi kekuasaan material dan strategi mempertahankannya. Elite menerangkan kelompok-kelompok yang menempati posisi strategis dalam negara dan masyarakat. Rakyat menerangkan sumber legitimasi demokratis sekaligus kumpulan aktor yang tidak homogen. Petani, pekerja, profesional, pengusaha kecil, komunitas adat, kelas menengah digital, mahasiswa, pemilih perkotaan, dan warga desa memiliki kepentingan, kapasitas, serta kerentanan yang berbeda. Karena itu, oposisi “elite versus rakyat” sering terlalu sederhana. Sebagian elite dapat memperjuangkan kepentingan publik; sebagian organisasi rakyat dapat dikooptasi; dan sebagian kebijakan populer dapat sekaligus melindungi kelompok rentan serta memperkuat patronase.

Analisis struktur kekuasaan harus membedakan tiga dimensi. Dimensi pertama adalah kekuasaan keputusan: siapa memenangkan perdebatan yang terlihat. Dimensi kedua adalah kekuasaan agenda: siapa menentukan isu yang boleh masuk ke ruang keputusan. Dimensi ketiga adalah kekuasaan pembentukan preferensi: siapa membentuk cara masyarakat memahami kepentingannya sendiri. Pemilu terutama bekerja pada dimensi pertama, sedangkan kepemilikan media, pembiayaan riset, produksi narasi digital, akses kepada pembuat kebijakan, dan penguasaan data dapat bekerja pada dimensi kedua dan ketiga. Demokrasi yang sehat harus mengawasi ketiganya.

Artikel ini menggunakan pendekatan naratif-analitis. Tujuannya bukan menyatakan bahwa semua keputusan pemerintah merupakan hasil konspirasi oligarki. Struktur kekuasaan lebih kompleks: terdapat kompetisi antarelite, otonomi relatif birokrasi, tekanan pasar global, aturan konstitusional, perlawanan masyarakat sipil, penilaian pengadilan, dan kejutan krisis. Namun kompleksitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pola. Ketika akses politik berulang kali mengikuti kekayaan, hubungan keluarga, posisi organisasi, serta kemampuan mengendalikan informasi, kita berhadapan dengan struktur yang sistematis, bukan sekadar perilaku individual.

2. Kerangka Konseptual: Oligarki, Elite, dan Kekuasaan

Secara klasik, oligarki berarti pemerintahan oleh sedikit orang. Dalam ekonomi politik kontemporer, konsep tersebut lebih berguna apabila dikaitkan dengan konsentrasi sumber daya material. Jeffrey A. Winters menekankan bahwa oligarki berkaitan dengan politik pertahanan kekayaan oleh aktor yang menguasai sumber daya sangat besar. Seorang oligark tidak harus selalu memegang jabatan publik. Ia dapat menggunakan pembiayaan kampanye, kepemilikan perusahaan, jaringan hukum, media, hubungan keluarga, organisasi bisnis, atau kedekatan dengan penguasa untuk menjaga kekayaan dan mengurangi ancaman redistribusi. Definisi ini membedakan oligarki dari sekadar elite. Semua oligark adalah elite material, tetapi tidak semua elite adalah oligark.

Teori elite, dari Pareto, Mosca, Michels hingga C. Wright Mills, mengingatkan bahwa organisasi besar cenderung melahirkan minoritas pengarah. Pengetahuan teknis, kendali atas informasi, pembagian kerja, dan kebutuhan koordinasi membuat kesetaraan politik sempurna sulit diwujudkan. “Hukum besi oligarki” Michels menunjukkan kecenderungan organisasi demokratis menghasilkan pimpinan profesional yang sukar dikendalikan anggota. Namun kecenderungan bukan takdir. Konstitusi internal, pembatasan masa jabatan, transparansi, kompetisi kepemimpinan, audit, pers bebas, dan hak anggota dapat mengurangi pemusatan kekuasaan.

Elite Indonesia bersifat majemuk. Ada elite politik dalam kepengurusan partai dan lembaga perwakilan; elite birokrasi dengan kewenangan regulatif; elite bisnis yang mengendalikan modal dan lapangan kerja; elite keamanan dengan kapasitas koersif; elite hukum yang menafsirkan dan menegakkan aturan; elite media serta platform yang mengatur visibilitas; elite pengetahuan yang memproduksi legitimasi; dan elite lokal yang menguasai jaringan patronase. Hubungan mereka tidak selalu harmonis. Koalisi dapat berubah mengikuti isu, sumber rente, pemilu, atau pergantian pemerintahan. Justru kemampuan oligarki bertahan sering terletak pada keluwesan membangun aliansi lintas rezim.

Kekuasaan perlu dilihat sebagai relasi, bukan benda yang dimiliki sekali untuk selamanya. Pengusaha memerlukan izin negara; politisi memerlukan suara; birokrasi memerlukan legitimasi dan anggaran; media memerlukan pendapatan; warga memerlukan informasi dan organisasi. Ketergantungan timbal balik menciptakan peluang tawar-menawar. Akan tetapi, posisi awalnya tidak setara. Warga yang terfragmentasi menghadapi biaya koordinasi tinggi, sedangkan elite memiliki jaringan, waktu, staf ahli, dan akses langsung. Ketimpangan kapasitas inilah yang mengubah kesetaraan formal “satu orang, satu suara” menjadi ketidaksetaraan pengaruh di antara pemilu.

3. Genealogi Historis Struktur Kekuasaan Indonesia

Struktur kekuasaan Indonesia dibentuk oleh sejarah panjang negara kolonial, revolusi, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi. Negara kolonial membangun birokrasi untuk

ekstraksi sumber daya, memelihara hierarki sosial, serta menggunakan perantara lokal. Kemerdekaan mengubah dasar legitimasi menjadi kedaulatan rakyat, tetapi negara baru mewarisi kapasitas administratif yang tidak merata dan ekonomi yang dikuasai jaringan besar. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kompetisi partai, militer, birokrasi, dan kelompok sosial dipusatkan di sekitar kepemimpinan presiden. Ketegangan ideologis dan konflik distributif membentuk jalan menuju konsolidasi Orde Baru.

Orde Baru membangun stabilitas melalui sentralisasi politik, dwifungsi militer, pengendalian partai, pembatasan masyarakat sipil, serta pembangunan ekonomi yang bersekutu dengan konglomerasi. Birokrasi menjadi mesin administrasi sekaligus mobilisasi. Pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pendidikan, dan infrastruktur memperluas kelas menengah, namun alokasi konsesi, kredit, lisensi, dan proteksi sering bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kapitalisme kroni bukan penyimpangan kecil dari sistem, melainkan salah satu mekanisme pembentukan koalisi rezim. Pada saat yang sama, negara memiliki kapasitas pembangunan yang nyata; karena itu warisannya bersifat ambivalen.

Krisis Asia 1997-1998 meruntuhkan dasar ekonomi dan legitimasi Orde Baru. Reformasi membawa amandemen konstitusi, pemilu kompetitif, kebebasan pers, otonomi daerah, penguatan lembaga audit, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pemilihan kepala daerah. Perubahan ini penting dan tidak boleh diremehkan. Namun, sebagaimana dikemukakan Robison dan Hadiz, jaringan kekuasaan lama tidak hilang; banyak yang direorganisasi dalam institusi baru. Aktor bisnis dan politik menyesuaikan diri dengan pemilu, desentralisasi, serta kebebasan berserikat. Kekuasaan tidak lagi tunggal dan terpusat, tetapi tersebar dalam arena yang lebih kompetitif.

Desentralisasi memindahkan kewenangan, anggaran, dan izin ke daerah. Hasilnya ganda. Di satu sisi, pemerintah lokal menjadi lebih dekat dengan warga, inovasi pelayanan muncul, dan pemimpin daerah dapat meniti karier melalui prestasi. Di sisi lain, desentralisasi membuka ruang bagi “orang kuat lokal”, dinasti, dan perburuan rente berbasis izin. Politik lokal memperlihatkan bahwa demokratisasi dapat memecah oligarki nasional tanpa otomatis menghapus oligarki; ia bisa melokalkan dan memperbanyak pusat kekuasaan. Karena itu, transisi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai demokratisasi yang nyata namun tidak tuntas.

4. Arsitektur Kekuasaan Formal dan Informal

Secara formal, kekuasaan Indonesia dibagi di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga pemeriksa, pemerintah daerah, serta berbagai komisi independen. Pembagian ini menciptakan veto, pengawasan, dan mekanisme koreksi. Tetapi lembaga formal selalu berinteraksi dengan institusi informal: patronase, hubungan keluarga, jaringan alumni, kedekatan bisnis, kesepakatan koalisi, pertukaran dukungan, dan norma loyalitas. Analisis yang hanya membaca undang-undang akan melewatkan cara keputusan sesungguhnya dinegosiasikan; analisis yang hanya menekankan jaringan informal juga berisiko mengabaikan batas hukum yang tetap memiliki efek.

Presiden memiliki legitimasi elektoral nasional dan perangkat administratif luas, tetapi memerlukan dukungan legislatif, partai, birokrasi, pemerintah daerah, serta kelompok ekonomi. Sistem presidensial multipartai mendorong koalisi besar. Koalisi dapat meningkatkan stabilitas dan memudahkan pengesahan program, tetapi juga mengurangi ketegasan oposisi serta memperluas pembagian jabatan dan sumber daya. Ketika hampir semua kekuatan besar berada dalam pemerintahan, pengawasan lebih banyak bergeser kepada pers, organisasi masyarakat sipil, pengadilan, perguruan tinggi, dan publik digital—aktor yang tidak selalu memiliki kewenangan formal untuk menghentikan keputusan.

Parlemen secara konstitusional merupakan arena representasi rakyat, pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Namun disiplin fraksi dan sentralisasi pencalonan memberi pimpinan partai pengaruh besar atas anggota. Proses legislasi dapat dipercepat oleh kebutuhan kebijakan yang sah, tetapi kecepatan tanpa transparansi memperbesar risiko dominasi kepentingan terorganisasi. Studi Tambunan tentang intervensi oligarki dalam proses legislatif menunjukkan pentingnya memperhatikan strategi kartel dan kontrol atas aturan kompetisi. Persoalannya bukan bahwa setiap kompromi merupakan korupsi, melainkan apakah semua kepentingan memiliki kesempatan masuk yang sebanding.

Yudikatif dan lembaga pengawasan menyediakan jalur koreksi, namun mereka juga berada dalam lingkungan kekuasaan. Independensi tidak cukup dijamin oleh teks konstitusi; ia memerlukan rekrutmen kredibel, keamanan jabatan, etika, transparansi putusan, kepatuhan terhadap putusan, dan pengawasan publik. Hukum dapat menjadi pembatas kekuasaan, arena konflik elite, atau instrumen legitimasi. Kualitas negara hukum diukur bukan hanya dari banyaknya regulasi, tetapi dari konsistensi penerapan terhadap aktor kuat maupun lemah.

5. Biaya Politik, Partai, dan Pasar Pencalonan

Biaya politik adalah simpul utama hubungan uang dan kekuasaan. Kandidat membutuhkan dana untuk membangun organisasi, mengunjungi wilayah luas, menghasilkan materi komunikasi, membayar saksi, melakukan survei, dan mempertahankan tim. Sebagian pengeluaran sah dan diperlukan dalam demokrasi. Masalah muncul ketika sumber dana tidak transparan, batas sumbangan mudah disiasati, pengawasan lemah, dan partai tidak memiliki pembiayaan kelembagaan memadai. Dalam kondisi itu, kandidat bergantung pada kekayaan pribadi atau donatur besar, sementara donatur mungkin mengharapkan akses, perlindungan, izin, proyek, atau arah regulasi.

Partai adalah jembatan antara masyarakat dan negara. Jika partai lemah secara programatik tetapi kuat dalam kontrol pencalonan, ia dapat berubah menjadi pasar tiket politik. Pemilih menerima daftar kandidat yang telah disaring elite organisasi. Rekrutmen berbasis kaderisasi, kompetensi, integritas, keterwakilan, dan rekam jejak kalah oleh popularitas, kedekatan, serta kemampuan pembiayaan. Akibatnya, korupsi tidak hanya berakar pada moral individu, tetapi pada model bisnis politik yang menuntut pengembalian investasi setelah kemenangan.

Kartelisasi terjadi ketika partai yang secara elektoral bersaing memiliki kepentingan bersama untuk menguasai sumber daya negara, membatasi pendatang baru, dan mengurangi ketidakpastian. Kartel tidak berarti tidak ada konflik; persaingan tetap keras saat pemilu dan pembagian posisi. Namun terdapat kesepakatan tersirat mengenai aturan yang melindungi pemain mapan. Ambang batas, struktur pencalonan, akses media, serta pembiayaan dapat menciptakan hambatan masuk. Demokrasi lalu menawarkan pergantian personal tanpa perubahan memadai pada struktur akses.

Reformasi perlu menghindari solusi naif. Pembiayaan negara untuk partai dapat mengurangi ketergantungan pada donor, tetapi tanpa audit dan demokrasi internal ia hanya menambah sumber rente. Pembatasan sumbangan dapat didorong ke transaksi gelap bila penegakan lemah. Transparansi waktu nyata, identifikasi pemilik manfaat, audit independen, sanksi efektif, pendidikan kader, dan alokasi dana publik berbasis kepatuhan harus dirancang sebagai satu ekosistem. Tujuannya bukan membuat politik tanpa uang, melainkan memastikan uang dapat dilacak dan tidak membeli keputusan publik.

6. Oligarki Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Kebijakan Publik

Ekonomi Indonesia ditandai oleh konglomerasi besar, badan usaha milik negara, jutaan UMKM, perusahaan asing, koperasi, serta sektor informal luas. Kekuasaan ekonomi menjadi kekuasaan politik ketika pelaku dapat memengaruhi regulasi, perpajakan, konsesi, tata ruang, pengadaan, pembiayaan, atau penegakan hukum. Sektor berbasis sumber daya alam sangat penting karena izin pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur menciptakan rente besar serta konflik penggunaan lahan. Kedekatan dengan pengambil keputusan dapat menentukan siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung biaya ekologis.

Hilirisasi menggambarkan ambivalensi kebijakan. Strategi ini dapat meningkatkan nilai tambah domestik, membangun industri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun tanpa kompetisi sehat, perlindungan pekerja, transparansi insentif, penerimaan negara adil, dan pengendalian lingkungan, manfaat dapat terkonsentrasi pada koalisi perusahaan dan pejabat. Pertanyaan demokratisnya bukan sekadar “pro atau kontra hilirisasi”, melainkan siapa memiliki aset, siapa menerima subsidi, siapa menanggung risiko, bagaimana kontrak disusun, dan apakah masyarakat lokal memiliki suara.

Regulatory capture terjadi ketika badan pengatur lebih responsif terhadap industri yang diaturnya daripada kepentingan umum. Penangkapan dapat berlangsung melalui suap, tetapi juga melalui jalur legal: revolving door, ketergantungan informasi teknis, pembiayaan asosiasi, konsultasi yang timpang, atau ancaman relokasi investasi. Karena kebijakan modern kompleks, pemerintah memang perlu berdialog dengan bisnis. Tantangannya adalah membedakan konsultasi dari dominasi. Daftar pertemuan, naskah posisi, konflik kepentingan, pemilik manfaat, dan alasan kebijakan perlu dibuka sejauh tidak melanggar kerahasiaan yang sah.

UMKM dan pekerja memiliki kekuatan ekonomi kolektif tetapi sering terfragmentasi. Perusahaan besar dapat menanggung biaya kepatuhan, penasihat hukum, dan lobi; usaha kecil menghadapi biaya per unit lebih tinggi. Kebijakan yang tampak netral dapat menghasilkan dampak tidak setara. Penilaian dampak regulasi perlu menguji distribusi manfaat dan beban menurut ukuran usaha, wilayah, gender, pekerjaan, serta generasi. Demokratisasi ekonomi bukan permusuhan terhadap perusahaan besar, melainkan pencegahan agar ukuran ekonomi tidak berubah menjadi kekebalan politik.

7. Dinasti Politik dan Reproduksi Elite

Dinasti politik muncul ketika hubungan keluarga menjadi mekanisme penting untuk memperoleh pencalonan, organisasi, dana, nama yang dikenal, dan jaringan birokrasi. Secara demokratis, seseorang tidak boleh kehilangan hak dipilih hanya karena keluarganya pernah menjabat. Karena itu, masalah dinasti bukan silsilah semata, melainkan keuntungan struktural yang tidak tersedia bagi warga lain. Ketika pencalonan, aparat, anggaran, bantuan, media lokal, dan jaringan bisnis berada dalam ekosistem keluarga yang sama, kompetisi dapat tetap berlangsung secara formal tetapi menjadi tidak seimbang secara substantif.

Dinasti bertahan karena mengurangi ketidakpastian bagi partai dan donor. Nama keluarga menyediakan merek politik, loyalitas jaringan, serta pengetahuan tentang birokrasi. Bagi pemilih, kandidat keluarga petahana kadang dipilih secara rasional karena dianggap berpengalaman atau mampu melanjutkan program. Ini menjelaskan mengapa kritik moral tidak cukup. Alternatif harus menawarkan organisasi, kandidat, dan pelayanan yang kredibel. Jika oposisi hanya hadir menjelang pemilu, pemilih akan kembali pada jaringan yang telah terbukti mampu menyediakan akses.

Reproduksi elite juga berlangsung melalui pendidikan eksklusif, profesi, perkawinan, jaringan sosial, dan kepemilikan aset. Meritokrasi dapat menyamarkan warisan keuntungan. Dua kandidat mungkin menjalani ujian yang sama, tetapi satu memiliki sekolah terbaik, waktu luang, modal sosial, dan perlindungan kegagalan. Kebijakan kesetaraan kesempatan harus bekerja jauh sebelum pencalonan: gizi, kesehatan, sekolah, akses digital, universitas, perumahan, dan pasar kerja. Demokrasi politik bergantung pada distribusi kapabilitas sosial.

Kebijakan antidinasti yang hanya berbasis hubungan darah rawan persoalan konstitusional dan mudah dihindari. Instrumen yang lebih kuat mencakup demokrasi internal partai, pemilihan pendahuluan yang transparan, aturan konflik kepentingan, larangan penggunaan sumber daya negara, keterbukaan kekayaan dan pemilik manfaat, profesionalisasi birokrasi, serta media lokal independen. Fokusnya harus pada penyalahgunaan keuntungan jabatan, bukan penghukuman identitas keluarga.

8. Birokrasi, Aparat, dan Teknokrasi

Birokrasi adalah tulang punggung negara. Ia mengubah janji politik menjadi anggaran, izin, sekolah, rumah sakit, perlindungan sosial, dan penegakan aturan. Birokrasi profesional dapat menjadi penyeimbang oligarki karena keputusan didasarkan pada hukum, bukti, standar pelayanan, serta keberlanjutan institusi. Sebaliknya, birokrasi yang dipolitisasi menjadi sumber patronase. Mutasi, promosi, pengadaan, dan izin dapat digunakan untuk membangun loyalitas. Netralitas aparatur karena itu bukan tuntutan administratif kecil, melainkan syarat kesetaraan kompetisi politik.

Teknokrasi menyediakan keahlian yang diperlukan untuk masalah fiskal, kesehatan, energi, lingkungan, dan transformasi digital. Namun pengetahuan teknis tidak netral sepenuhnya. Pemilihan indikator, model, dan asumsi mengandung nilai distributif. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat merugikan komunitas tertentu. Teknokrat harus menjelaskan ketidakpastian, alternatif, pemenang, dan pihak yang menanggung biaya. Partisipasi publik tidak menggantikan keahlian, dan keahlian tidak menggantikan legitimasi demokratis.

Aparat keamanan memegang monopoli penggunaan kekuatan yang sah. Dalam demokrasi, kekuasaan koersif harus tunduk pada hukum, kontrol sipil, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Keterlibatan luas dalam urusan sipil dapat dipandang membantu ketika kapasitas administrasi terbatas, tetapi juga berisiko mengaburkan tanggung jawab dan mempersempit ruang kritik. Pembagian mandat yang jelas melindungi profesionalisme aparat sekaligus hak warga.

Transformasi digital pemerintahan menghadirkan peluang dan bahaya baru. Integrasi data dapat mengurangi kebocoran, memperbaiki bantuan, dan meningkatkan pelayanan. Namun data penduduk, sistem prediksi, pengenalan wajah, dan kecerdasan buatan juga dapat memperbesar pengawasan. Jika algoritma dan vendor tidak transparan, kekuasaan berpindah kepada kombinasi birokrasi teknis dan perusahaan teknologi. Tata kelola digital memerlukan dasar hukum, minimisasi data, audit algoritma, keamanan siber, hak koreksi, dan jalur keberatan manusiawi.

9. Media, Platform Digital, dan Produksi Persetujuan

Media adalah arena tempat kekuasaan terlihat sekaligus disembunyikan. Kepemilikan terkonsentrasi dapat memengaruhi seleksi isu, penonjolan aktor, dan batas perdebatan. Pengaruh tidak selalu berbentuk perintah langsung kepada redaksi; ia dapat bekerja melalui struktur insentif, kepentingan bisnis, ketergantungan iklan, dan kedekatan politik. Namun jurnalis profesional, pers lokal, media nirlaba, dan pluralitas outlet tetap menyediakan ruang koreksi. Analisis yang menganggap media sepenuhnya dikendalikan akan gagal melihat konflik internal serta kemampuan investigasi.

Platform digital menurunkan biaya berbicara dan berorganisasi. Warga dapat mendokumentasikan penyalahgunaan, menggalang solidaritas, dan menantang narasi resmi. Pada saat yang sama, algoritma perhatian memberi keuntungan kepada emosi, polarisasi, dan konten

berbayar. Pasukan siber, influencer politik, mikro-targeting, bot, serta disinformasi mengubah uang menjadi visibilitas. Ketimpangan bukan lagi hanya siapa memiliki stasiun televisi, tetapi siapa memiliki data, kemampuan analitik, jaringan akun, dan anggaran promosi.

Publik digital mudah tampak kuat tetapi rapuh. Viralitas tidak selalu berubah menjadi organisasi, kebijakan, atau anggaran. Kemarahan singkat dapat menghilang ketika siklus perhatian berganti. Elite belajar mengelola krisis komunikasi tanpa mengubah struktur. Karena itu, aktivisme digital perlu dihubungkan dengan penelitian, litigasi strategis, advokasi legislatif, organisasi lokal, dan pemantauan implementasi. Klik menjadi kekuasaan hanya ketika diterjemahkan ke dalam kapasitas kolektif.

Literasi media harus melampaui kemampuan membedakan berita benar dan palsu. Warga perlu memahami kepemilikan, model bisnis platform, iklan politik, cara algoritma bekerja, serta insentif pembuat konten. Negara perlu mengatur transparansi platform tanpa menjadikan pemberantasan disinformasi sebagai dalih membungkam kritik. Solusinya adalah tata kelola multipihak, proses keberatan, pelaporan iklan politik, akses peneliti terhadap data, dan perlindungan kebebasan berekspresi.

10. Rakyat sebagai Aktor: Dari Pemilih menuju Warga Negara

Istilah rakyat sering digunakan sebagai sumber legitimasi, tetapi rakyat bukan kesatuan tanpa perbedaan. Kepentingan buruh formal berbeda dari pekerja platform; petani pemilik berbeda dari buruh tani; masyarakat adat berbeda pengalaman dari kelas menengah metropolitan. Identitas agama, etnis, wilayah, gender, dan generasi berpotongan dengan kelas ekonomi. Politisi dapat menyatukan kelompok melalui program, simbol, atau musuh bersama. Analisis demokratis harus menghormati perbedaan sambil mencari kepentingan publik yang dapat dinegosiasikan.

Pemilu memberikan momen kesetaraan formal. Suara orang kaya tidak dihitung lebih dari suara orang miskin. Kekuatan ini nyata: petahana dapat kalah, koalisi berubah, dan isu publik dapat memengaruhi hasil. Tetapi warga memasuki bilik suara setelah mengalami ketimpangan informasi, patronase, ketergantungan ekonomi, dan pilihan kandidat yang telah disaring. Politik uang harus dibaca sebagai transaksi yang salah sekaligus gejala ketidakamanan sosial. Bagi warga rentan, manfaat langsung mungkin lebih pasti daripada janji kebijakan jangka panjang.

Kewargaan substantif memerlukan kemampuan menggunakan hak. Orang yang bekerja berjam-jam, takut kehilangan bantuan, tidak memiliki akses dokumen, atau menghadapi kekerasan akan sulit berpartisipasi setara. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan akses hukum bukan hanya kebijakan kesejahteraan; semuanya merupakan infrastruktur demokrasi. Redistribusi kapabilitas memperluas kebebasan warga untuk menolak patronase.

Organisasi adalah pengganda kekuasaan rakyat. Serikat, koperasi, organisasi profesi, komunitas adat, kelompok perempuan, organisasi keagamaan, asosiasi UMKM, kampus, dan kelompok warga dapat mengumpulkan informasi, membagi biaya, melatih pemimpin, serta

mempertahankan advokasi. Namun organisasi juga dapat dibajak elite internal. Demokrasi internal, akuntabilitas, regenerasi, dan transparansi harus berlaku bagi masyarakat sipil sebagaimana dituntut dari partai dan negara.

11. Politik Identitas, Populisme, dan Patronase

Politik identitas tidak selalu antidemokratis. Kelompok yang mengalami diskriminasi membutuhkan identitas kolektif untuk menuntut pengakuan dan hak. Masalah muncul ketika identitas digunakan untuk menutup perdebatan kebijakan, mendefinisikan lawan sebagai bukan bagian sah dari bangsa, atau mengalihkan perhatian dari ketimpangan material. Elite dapat memobilisasi sentimen agama dan etnis karena biayanya lebih rendah daripada membangun program redistributif yang mengganggu kepentingan kuat.

Populisme membagi arena menjadi “rakyat murni” melawan “elite korup”. Bahasa ini dapat membuka kritik terhadap konsentrasi kekuasaan, tetapi juga dapat memusatkan harapan pada seorang pemimpin. Jika lembaga perantara dianggap penghalang kehendak rakyat, pengawasan, pers, pengadilan, dan oposisi dapat dilemahkan. Populisme dapat berkoalisi dengan oligarki: pemimpin menggunakan retorika rakyat, sementara pembiayaan dan kebijakan tetap bergantung pada elite material.

Patronase menghubungkan sumber daya dengan dukungan personal atau kelompok. Ia tumbuh ketika pelayanan universal lemah dan akses bergantung pada perantara. Seorang broker lokal mungkin benar-benar membantu warga memperoleh rumah sakit, bantuan, atau dokumen. Karena itu patronase memiliki dasar sosial. Reformasi harus mengganti manfaat selektif dengan hak universal, prosedur sederhana, dan mekanisme keluhan. Mengutuk penerima tanpa memperbaiki institusi hanya menyalahkan korban struktur.

Bantuan sosial sangat penting untuk melindungi warga dan menstabilkan ekonomi. Ia menjadi problematis bila data, jadwal, kemasan komunikasi, atau distribusinya dipakai untuk keuntungan elektoral tertentu. Pemisahan antara negara, pemerintah, partai, dan kandidat perlu ditegaskan. Registri penerima yang akurat, kriteria terbuka, pembayaran langsung, audit, serta komunikasi yang menyebut bantuan sebagai hak warga dapat mengurangi personalisasi.

12. Desentralisasi, Elite Lokal, dan Ketimpangan Wilayah

Indonesia yang luas tidak mungkin dipahami hanya dari Jakarta. Struktur kekuasaan berbeda menurut basis ekonomi, sejarah konflik, kepadatan organisasi masyarakat, kapasitas fiskal, dan kekuatan media lokal. Daerah kaya sumber daya dapat memiliki pendapatan besar tetapi juga ketergantungan pada komoditas serta konsesi. Daerah dengan basis pajak sempit bergantung pada transfer pusat. Ketergantungan fiskal memengaruhi otonomi substantif pemerintah daerah.

Pemilihan kepala daerah membuka kompetisi dan inovasi. Banyak kebijakan pelayanan lahir dari kepemimpinan lokal. Namun biaya kontestasi dan kontrol partai pusat dapat mendorong koalisi

antara kandidat, pengusaha kontraktor, birokrasi, serta tokoh sosial. Setelah menang, tekanan pengembalian biaya muncul melalui proyek, jabatan, atau izin. Penguatan pengadaan elektronik saja tidak cukup bila spesifikasi, perencanaan, dan pemilik perusahaan dapat direkayasa.

Desa menerima kewenangan dan dana yang lebih besar. Ini berpotensi memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Risiko elite capture meningkat ketika informasi anggaran rendah, musyawarah hanya formal, dan kelompok marjinal tidak berani berbicara. Pengalaman pembangunan berbasis komunitas menunjukkan bahwa elite tidak selalu merugikan; elite lokal dapat menyediakan kapasitas dan jaringan. Pertanyaannya apakah proses terbuka, manfaat tersebar, dan warga memiliki jalur koreksi.

Pengawasan lokal memerlukan data yang dapat digunakan, bukan sekadar dipublikasikan. Anggaran harus disajikan dalam bahasa sederhana, proyek diberi lokasi dan nilai, penerima manfaat dapat diverifikasi, serta pengaduan aman dari balasan. Universitas daerah, pers lokal, dan organisasi profesi dapat menjadi infrastruktur pengetahuan. Ketika kapasitas pengawasan hanya terpusat di ibu kota, oligarki lokal menikmati ruang gelap.

13. Hukum, Korupsi, dan Akuntabilitas

Korupsi adalah penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sedangkan oligarki adalah struktur konsentrasi kekuasaan material. Keduanya beririsan tetapi tidak identik. Oligark dapat menggunakan cara legal untuk memengaruhi kebijakan; pejabat kecil dapat korup tanpa menjadi oligark. Fokus eksklusif pada penangkapan pelaku dapat mengabaikan regulasi yang secara sah dirancang menguntungkan pihak tertentu. Sebaliknya, kritik struktural tanpa penegakan individual dapat menghilangkan tanggung jawab personal.

Akuntabilitas memiliki dimensi vertikal, horizontal, dan sosial. Vertikal berlangsung melalui pemilu. Horizontal berlangsung melalui parlemen, pengadilan, audit, dan lembaga pengawas. Sosial berlangsung melalui pers, organisasi warga, akademisi, dan protes. Ketiganya harus saling menopang. Pemilu lima tahunan terlalu jarang untuk mengawasi ribuan keputusan; lembaga negara dapat mengalami konflik kepentingan; masyarakat sipil memerlukan informasi dan perlindungan.

Pemberantasan korupsi yang berkelanjutan harus menyasar sisi permintaan dan penawaran: pejabat penerima, perusahaan pemberi, perantara, pencucian uang, serta pemilik manfaat akhir. Pengadaan terbuka, digitalisasi, perlindungan pelapor, pemulihan aset, registri kepemilikan, dan kerja sama lintas batas penting. Namun teknologi tidak menggantikan independensi penegak hukum. Sistem digital dapat dimanipulasi pada tahap perencanaan atau dibuat tidak interoperabel.

Kepastian hukum bukan berarti kepastian bagi pemodal bahwa kebijakan tidak berubah. Ia berarti aturan jelas, proses dapat diprediksi, hak warga terlindungi, kontrak ditegakkan, dan pemerintah dapat membuat perubahan sah melalui prosedur transparan. Negara hukum yang adil menguntungkan investasi jangka panjang sekaligus masyarakat. Ketika aktor kuat memperoleh

pengecualian, biaya ekonomi meningkat karena pelaku lain bergantung pada koneksi, bukan produktivitas.

14. Membaca Kebijakan melalui Lensa Distribusi Kekuasaan

Setiap kebijakan perlu diuji dengan lima pertanyaan. Pertama, siapa menentukan definisi masalah? Kedua, siapa hadir dan tidak hadir dalam konsultasi? Ketiga, siapa memperoleh manfaat dan menanggung biaya? Keempat, mekanisme apa yang mengawasi implementasi? Kelima, apakah kebijakan memperbesar atau mengurangi kapasitas warga untuk memengaruhi keputusan berikutnya? Kerangka ini mencegah analisis berhenti pada niat resmi.

Ambil contoh proyek infrastruktur. Proyek dapat meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan pemerataan. Namun analisis kekuasaan menanyakan pemilihan lokasi, pembebasan lahan, kontraktor, pembiayaan, jaminan pemerintah, dampak lingkungan, dan akses kelompok miskin. Kritik tidak otomatis menolak pembangunan; ia memperbaiki distribusi risiko dan manfaat. Konsultasi yang dimulai setelah desain final hanya menghasilkan legitimasi, bukan partisipasi.

Dalam kebijakan digital, efisiensi sering menjadi bahasa dominan. Sistem identitas, pembayaran, dan layanan terpadu dapat mengurangi korupsi kecil. Tetapi konsentrasi data menciptakan kekuasaan baru. Vendor yang menguasai arsitektur dapat mengunci negara; lembaga yang memegang data dapat memperluas fungsi tanpa persetujuan; warga yang salah diklasifikasi dapat kehilangan hak. Penilaian dampak hak asasi dan audit independen perlu menjadi bagian desain.

Dalam kebijakan iklim dan energi, transisi menghasilkan pemenang dan pihak terdampak. Investasi energi bersih diperlukan, namun pengadaan lahan, mineral kritis, tarif, subsidi, dan pekerjaan baru dapat direbut elite. Transisi adil memerlukan dialog pekerja, pembagian penerimaan, rehabilitasi wilayah, peningkatan keterampilan, dan partisipasi komunitas. Tanpa itu, kebijakan hijau dapat mereproduksi ekstraktivisme dengan warna baru.

15. Kelas Menengah, Profesional, dan Elite Pengetahuan

Kelas menengah sering dianggap penopang demokrasi karena berpendidikan, memiliki akses informasi, dan relatif mandiri dari patronase. Anggapan ini hanya sebagian benar. Kelas menengah Indonesia sangat beragam: pegawai negeri, profesional swasta, wirausaha, pekerja kreatif, akademisi, pekerja platform, dan rumah tangga yang baru keluar dari kerentanan. Sebagian mendukung kebebasan sipil dan pemerintahan bersih; sebagian lebih mengutamakan stabilitas, pertumbuhan, dan ketertiban. Ketika keamanan ekonomi rapuh, preferensi demokratis dapat berubah. Status kelas menengah tidak otomatis menghasilkan komitmen pada pluralisme atau redistribusi.

Profesional memiliki posisi penting karena menerjemahkan kekuasaan menjadi keputusan teknis. Pengacara menyusun kontrak, konsultan membuat studi kelayakan, akuntan mengaudit,

insinyur merancang proyek, dokter mengatur pelayanan, dan ahli data membangun sistem. Etika profesi menentukan apakah keahlian memperkuat kepentingan publik atau membantu elite menghindari pertanggungjawaban. Kepatuhan formal belum tentu cukup; suatu transaksi dapat legal tetapi merusak integritas kebijakan. Organisasi profesi perlu menegakkan standar konflik kepentingan, keterbukaan, dan kewajiban terhadap masyarakat.

Perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan, legitimasi, dan calon elite. Kampus dapat menjadi ruang kritik, tetapi juga bergantung pada anggaran negara, biaya pendidikan, hibah, serta kerja sama industri. Ketergantungan tidak dengan sendirinya menghilangkan independensi, namun harus dikelola. Pengungkapan sumber dana, kebebasan akademik, metodologi terbuka, peer review, dan perlindungan peneliti diperlukan agar hasil kajian tidak menjadi stempel kebijakan yang telah diputuskan. Ahli tidak boleh menyembunyikan pilihan nilai di balik bahasa teknis.

Think tank dan lembaga survei memengaruhi persepsi kelayakan kandidat serta kebijakan. Survei yang baik menyediakan gambaran opini publik, tetapi publikasi selektif, desain pertanyaan, sponsor, dan interpretasi dapat menggeser arena. Transparansi metodologi dan pembiayaan menjadi penting. Angka bukan pengganti deliberasi: dukungan mayoritas pada satu waktu tidak otomatis membenarkan pelanggaran hak minoritas atau menutup perdebatan tentang konsekuensi jangka panjang.

Elite pengetahuan memiliki tanggung jawab ganda. Mereka harus menjaga ketepatan ilmiah sekaligus membuat pengetahuan dapat digunakan warga. Artikel berbayar, jargon, dan konsentrasi pusat riset di kota besar menciptakan ketimpangan epistemik. Kolaborasi dengan kampus daerah, data terbuka, publikasi bahasa Indonesia, dan pendidikan publik dapat memperluas distribusi pengetahuan. Demokrasi yang hanya membuka data tanpa membangun kemampuan membaca data akan tetap dikuasai mereka yang mampu menyewa ahli.

16. Gender, Generasi, dan Kelompok yang Kurang Terwakili

Struktur elite tidak netral gender. Perempuan menghadapi hambatan pembiayaan, beban perawatan, kekerasan politik, stereotip kepemimpinan, serta jaringan informal yang didominasi laki-laki. Kuota pencalonan memperluas kehadiran, tetapi representasi deskriptif belum selalu menjadi pengaruh substantif. Kandidat perempuan dapat ditempatkan di daerah sulit menang atau bergantung pada dinasti. Reformasi perlu mencakup penempatan yang wajar, dukungan kader, perlindungan dari kekerasan, pembiayaan, serta fasilitas kerja yang mengakui tanggung jawab perawatan.

Kaum muda merupakan bagian besar pemilih dan paling terpapar ekonomi digital, ketidakpastian kerja, biaya perumahan, dan krisis iklim. Mereka memiliki keterampilan komunikasi baru tetapi sering tidak memiliki akses ke struktur partai. Politik menawarkan peran sebagai pemilih, relawan, atau pembuat konten, sementara ruang menentukan platform tetap terbatas. Organisasi pemuda memerlukan jalur dari mobilisasi menuju kepemimpinan dan penyusunan kebijakan. Regenerasi bukan mengganti usia elite tanpa mengubah cara kekuasaan bekerja.

Masyarakat adat dan komunitas lokal menghadapi ketimpangan ketika keputusan tentang tanah, hutan, tambang, dan pesisir dibuat jauh dari wilayahnya. Pengakuan formal tidak selalu diikuti pemetaan, perlindungan hak, atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Konsultasi yang bergantung pada elite lokal dapat mengecualikan perempuan, pemuda, atau kelompok subordinat. Representasi komunitas harus diverifikasi melalui proses internal yang terbuka dan tidak dipaksakan oleh perusahaan atau pemerintah.

Penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik, informasi, dan prosedural dalam pemilu serta pelayanan publik. Ketika partisipasi dirancang untuk warga “rata-rata”, sebagian rakyat secara praktis dikeluarkan. Aksesibilitas tempat pemungutan, informasi dalam berbagai format, pendampingan yang menjaga kerahasiaan, dan keterwakilan dalam konsultasi adalah bagian dari struktur kekuasaan, bukan isu tambahan.

Pendekatan interseksional membantu melihat bahwa ketimpangan saling bertumpuk. Perempuan adat di wilayah ekstraktif, misalnya, mengalami relasi gender, kelas, wilayah, dan pengakuan hukum sekaligus. Statistik agregat dapat menutupi pengalaman tersebut. Analisis dampak kebijakan perlu menggunakan data terpilah tanpa membahayakan privasi. Kelompok terdampak harus terlibat sejak perumusan masalah, bukan hanya diminta menyetujui solusi.

17. Perbandingan dan Pelajaran dari Negara Demokrasi Lain

Oligarki bukan kekhasan Indonesia. Demokrasi mapan juga menghadapi pembiayaan kampanye oleh donor besar, revolving door, konsentrasi media, dan lobi industri. Perbedaannya terletak pada kekuatan institusi, transparansi, organisasi tandingan, serta tingkat ketimpangan. Perbandingan mencegah stigmatisasi Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pemilu saja tidak pernah cukup untuk menjamin kesetaraan pengaruh.

Di sejumlah negara, registrasi lobi dan pelaporan pertemuan membantu publik mengetahui siapa memengaruhi kebijakan. Mekanisme ini tidak menghapus dominasi, tetapi meninggalkan jejak yang dapat diperiksa. Indonesia dapat mengadaptasi, bukan menyalin. Definisi lobi harus mencakup konsultan, asosiasi, firma hukum, dan komunikasi digital, sementara pertemuan warga biasa tidak dibebani birokrasi. Aturan harus fokus pada aktor profesional yang berusaha memengaruhi keputusan bernilai besar.

Pendanaan partai oleh negara diterapkan dalam berbagai bentuk. Pelajarannya, dana publik efektif bila terkait audit, transparansi, dan insentif organisasi, bukan semata jumlah suara. Sebagian dana dapat dialokasikan untuk pendidikan politik, penelitian kebijakan, kader perempuan dan pemuda, serta cabang daerah. Pelanggaran harus mengurangi pembayaran berikutnya. Pada saat yang sama, kebebasan asosiasi menuntut agar negara tidak menggunakan pendanaan untuk mengendalikan oposisi.

Pengalaman participatory budgeting menunjukkan bahwa warga dapat memengaruhi prioritas anggaran bila informasi, fasilitasi, dan tindak lanjut jelas. Forum yang hanya menampung daftar

keinginan tanpa batas anggaran menciptakan frustrasi. Model terbaik memberikan pagu nyata, data biaya, perwakilan wilayah, dan laporan pelaksanaan. Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang dapat diperkuat dengan desain deliberatif serta teknologi yang inklusif.

Pelajaran terpenting ialah tidak ada desain institusi yang kebal kooptasi. Elite belajar dan beradaptasi. Transparansi dapat dipenuhi secara formal dengan data sulit dibaca; kuota dapat diisi kerabat; konsultasi dapat dibanjiri organisasi semu; platform partisipasi dapat dimanipulasi. Karena itu reformasi membutuhkan evaluasi berkala, eksperimen, jurnalisme, riset independen, dan kemampuan mengubah aturan ketika konsekuensi tak terduga muncul.

18. Indikator untuk Mendiagnosis Konsentrasi Kekuasaan

Diagnosis oligarki perlu indikator yang dapat diuji. Indikator ekonomi mencakup konsentrasi kepemilikan, pangsa pasar, kekayaan, akses kredit, konsesi, dan penerimaan manfaat pajak. Indikator politik mencakup konsentrasi donasi, biaya kampanye, tingkat pergantian kepemimpinan partai, proporsi kandidat dinasti, serta hubungan bisnis pejabat. Indikator media mencakup kepemilikan silang, pangsa audiens, belanja iklan politik, dan transparansi platform.

Indikator proses kebijakan mencakup waktu publik memperoleh rancangan, keragaman peserta konsultasi, publikasi naskah akademik, matriks masukan, frekuensi perubahan mendadak, dan kepatuhan pada putusan. Indikator hasil mencakup distribusi subsidi, kontrak, manfaat infrastruktur, beban pajak, dampak lingkungan, dan akses pelayanan. Konsentrasi hasil tidak selalu membuktikan capture; ia menjadi sinyal yang harus dijelaskan.

Analisis jaringan dapat memetakan hubungan antara perusahaan, pemilik manfaat, pejabat, partai, yayasan, dan media. Namun peta hubungan tidak boleh dianggap bukti kesalahan. Kedekatan dapat sah. Nilainya terletak pada identifikasi titik konsentrasi dan konflik kepentingan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Akurasi identitas, pembaruan data, dan hak koreksi penting untuk mencegah tuduhan tidak berdasar.

Survei persepsi membantu mengukur kepercayaan, tetapi perlu dilengkapi data perilaku dan institusi. Ketidakpercayaan tinggi dapat muncul karena skandal nyata, polarisasi, atau paparan disinformasi. Sebaliknya, kepercayaan tinggi tidak selalu berarti akuntabilitas kuat; ia dapat mencerminkan keberhasilan kinerja atau rendahnya informasi. Triangulasi antara survei, anggaran, putusan, kepemilikan, dan observasi lapangan menghasilkan diagnosis lebih baik.

Universitas dan lembaga negara dapat membangun indeks pluralisme kekuasaan secara berkala. Tujuannya bukan memberi satu peringkat sensasional, melainkan menunjukkan tren dan titik rawan menurut sektor serta wilayah. Indikator harus dikembangkan secara partisipatif, metodologinya terbuka, dan datanya dapat diaudit. Pengukuran yang baik mengubah istilah oligarki dari label retorik menjadi agenda penelitian serta kebijakan.

19. Studi Kasus Analitis: Bagaimana Struktur Bekerja

Kasus pertama adalah pembentukan undang-undang yang menyentuh banyak sektor. Pemerintah mungkin memiliki alasan sah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi. Dunia usaha membawa data biaya serta hambatan; serikat membawa pengalaman pekerja; pemerintah daerah membawa persoalan implementasi; akademisi menilai konsistensi; masyarakat sipil menguji dampak hak dan lingkungan. Struktur menjadi oligarkis bukan karena bisnis hadir, melainkan bila akses bisnis jauh lebih awal dan intensif, rancangan berubah tanpa jejak, waktu publik terlalu singkat, dan masukan kelompok terdampak tidak dijawab. Ukuran demokratisnya adalah kesetaraan prosedural dan alasan publik, bukan tuntutan agar semua usulan diterima.

Dalam situasi tersebut, transparansi naskah merupakan kondisi perlu tetapi belum cukup. Dokumen ratusan halaman yang muncul menjelang pengesahan secara formal terbuka, namun secara substantif tidak dapat dipelajari. Partisipasi bermakna memerlukan waktu, versi yang dapat dibandingkan, ringkasan perubahan, data pendukung, dan daftar pertemuan. Parlemen perlu menunjukkan mengapa alternatif tertentu ditolak. Kewajiban memberi alasan memperlambat keputusan secara terbatas, tetapi meningkatkan kualitas, kepatuhan, dan legitimasi.

Kasus kedua adalah izin pertambangan di daerah. Perusahaan menjanjikan investasi, pendapatan, jalan, dan pekerjaan. Pemerintah daerah membutuhkan pertumbuhan serta basis fiskal. Komunitas menghadapi pilihan sulit antara kesempatan kerja dan risiko terhadap air, kebun, kesehatan, serta identitas budaya. Elite lokal dapat menjadi perantara dengan mengklaim mewakili warga. Jika informasi teknis hanya dimiliki perusahaan dan pemerintah, persetujuan mudah menjadi formalitas. Dana kompensasi dapat menguntungkan beberapa tokoh sementara biaya ekologis menyebar lintas generasi.

Tata kelola yang lebih adil dimulai dari data dasar independen, pengakuan hak tanah, pemetaan sosial, konsultasi berulang, serta perwakilan perempuan dan kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya. Kontrak sosial perlu menjelaskan pekerjaan lokal, pengadaan, pembagian pendapatan, pemantauan air, reklamasi, jaminan keuangan, dan mekanisme penghentian. Komite pemantau tidak boleh didanai tanpa jarak oleh perusahaan yang diawasinya. Bila proyek berjalan, data lingkungan harus tersedia hampir waktu nyata dan dapat diuji laboratorium independen.

Kasus ketiga adalah pengadaan digital untuk pelayanan publik. Sistem elektronik tampak objektif dan dapat mengurangi pertemuan langsung yang rawan suap. Namun kekuasaan dapat berpindah ke tahap penyusunan spesifikasi. Syarat teknis mungkin hanya cocok untuk vendor tertentu; kontrak dapat memecah nilai; algoritma evaluasi tidak dijelaskan; biaya pemeliharaan dan penguncian vendor diabaikan. Perusahaan yang memenangkan tender kemudian memperoleh informasi serta posisi tawar untuk kontrak berikutnya. Korupsi modern sering bersembunyi dalam kompleksitas teknis, bukan amplop.

Pencegahannya mencakup standar terbuka, interoperabilitas, publikasi spesifikasi sebelum tender, konsultasi pasar yang terdokumentasi, deklarasi konflik kepentingan, serta audit biaya siklus hidup. Pemerintah perlu memiliki arsitek sistem dan kemampuan negosiasi sendiri agar tidak bergantung pada vendor. Kode sumber atau setidaknya dokumentasi kritis harus dapat diaudit sesuai risiko. Pengguna akhir—guru, tenaga kesehatan, petugas daerah, dan warga—perlu dilibatkan agar proyek tidak hanya memenuhi indikator penyerapan anggaran.

Kasus keempat adalah bantuan sosial menjelang pemilu. Bantuan dapat sangat diperlukan akibat kenaikan harga atau bencana. Pemerintah memang berkewajiban bertindak, dan penundaan demi menghindari persepsi politik dapat merugikan warga. Masalah muncul bila penetapan waktu tidak berbasis kebutuhan, penerima bergantung pada broker, kemasan menonjolkan kandidat, atau data digunakan untuk kampanye. Oligarki dan patronase bertemu ketika sumber daya publik dipersonalisasi sebagai kemurahan hati penguasa.

Desain yang melindungi warga memisahkan komunikasi negara dari komunikasi kandidat, menggunakan aturan pemicu yang diumumkan sebelumnya, dan menyalurkan manfaat melalui sistem yang dapat diaudit. Warga perlu mengetahui dasar hak, nilai bantuan, periode, serta saluran koreksi. Pemantau pemilu dan auditor harus dapat menguji perubahan pola distribusi. Tujuannya bukan menghapus kebijakan sosial dari tahun politik, melainkan mencegah kepemilikan partisan atas hak warga.

Kasus kelima adalah pembangunan kawasan perkotaan. Pemerintah ingin mengurangi kemacetan, menyediakan hunian, dan menarik investasi. Pengembang menguasai modal serta lahan; bank mengatur pembiayaan; warga kampung memegang hak formal atau penguasaan historis; kelas menengah menginginkan fasilitas. Perubahan tata ruang dapat menciptakan kenaikan nilai luar biasa. Bila informasi rencana dikuasai segelintir pihak, keuntungan privat berasal dari keputusan publik. Penggusuran kemudian diperlakukan sebagai masalah administrasi, bukan konflik distribusi.

Instrumen seperti land value capture dapat mengembalikan sebagian kenaikan nilai untuk transportasi, perumahan terjangkau, dan ruang publik. Namun penilaian tanah, pengecualian, dan penggunaan penerimaan harus transparan. Warga terdampak memerlukan bantuan hukum serta pilihan relokasi yang mempertahankan mata pencaharian. Pemerintah perlu mengumumkan perubahan tata ruang beserta pemilik manfaat lahan utama. Dengan demikian pembangunan tetap berjalan, tetapi keuntungan yang diciptakan kolektif tidak seluruhnya diprivatisasi.

Kasus keenam adalah kebijakan pendidikan tinggi. Elite ekonomi dan politik memiliki akses ke universitas unggul, jaringan internasional, dan sertifikasi. Ketika biaya meningkat, mahasiswa dari keluarga rentan mungkin masuk tetapi menanggung utang, bekerja berlebihan, atau memilih program berdasarkan kemampuan membayar. Kampus lalu mereproduksi elite sambil memakai bahasa meritokrasi. Pada sisi lain, ekspansi tanpa mutu juga merugikan mahasiswa karena ijazah tidak menghasilkan kapabilitas.

Kebijakan yang demokratis menggabungkan bantuan berbasis kebutuhan, mutu pengajaran, jalur vokasi, mobilitas antarkampus, keterbukaan hasil lulusan, dan dukungan bagi daerah. Seleksi perlu mengakui konteks tanpa mengorbankan standar. Magang dan jejaring profesional harus dapat diakses bukan hanya melalui koneksi keluarga. Universitas juga perlu mengajarkan etika publik kepada calon manajer, pejabat, insinyur, dan ahli teknologi. Demokratisasi elite berlangsung ketika pintu masuk terbuka dan nilai pelayanan publik tertanam.

Enam kasus tersebut menunjukkan pola umum. Pertama, kebijakan selalu memerlukan keahlian dan organisasi, sehingga elite tidak dapat dihapus. Kedua, ketimpangan muncul pada waktu akses, kualitas informasi, kapasitas negosiasi, dan kemampuan bertahan dalam proses panjang. Ketiga, formalitas keterbukaan dapat coexist dengan dominasi substantif. Keempat, koreksi paling efektif menggabungkan aturan, data, organisasi warga, serta profesional berintegritas. Analisis oligarki menjadi berguna ketika menunjukkan titik intervensi yang konkret.

20. Strategi Warga dan Etika Kepemimpinan Demokratis

Warga menghadapi dilema tindakan kolektif: semua menginginkan pemerintahan bersih, tetapi biaya mengawasi ditanggung individu. Organisasi membagi biaya itu. Langkah praktis meliputi pemantauan anggaran lokal, permintaan informasi, dokumentasi konflik kepentingan, dukungan jurnalisme, partisipasi rapat publik, dan pembentukan koalisi lintas isu. Strategi kecil yang berkelanjutan sering lebih efektif daripada mobilisasi besar tanpa tindak lanjut.

Koalisi reformasi perlu menghubungkan kepentingan berbeda. UMKM dapat bersekutu dengan konsumen dalam persaingan sehat; pekerja dengan perusahaan produktif dalam peningkatan keterampilan; komunitas lingkungan dengan investor jangka panjang dalam kepastian standar. Membingkai reformasi sebagai perang antara bisnis dan rakyat justru menyatukan elite yang seharusnya dapat dipisahkan. Strategi demokratis mencari pecahan dalam koalisi dominan dan membangun insentif bagi perubahan.

Kepemimpinan demokratis memerlukan kemampuan menggunakan kekuasaan tanpa mempersonalisasikannya. Pemimpin harus membangun institusi yang tetap bekerja setelah dirinya pergi, menerima kritik, mengungkap konflik kepentingan, dan membedakan loyalitas kepada program dari loyalitas pribadi. Ukuran keberhasilan bukan hanya kecepatan keputusan, tetapi kualitas proses, korektabilitas, dan distribusi kapasitas.

Etika publik tidak cukup berupa integritas pribadi. Pemimpin jujur dapat tetap menghasilkan sistem tidak adil bila tidak memahami struktur. Sebaliknya, institusi baik dapat membatasi kerusakan dari individu buruk. Etika dan institusi harus bertemu: karakter mendorong kepatuhan pada batas, sedangkan aturan mencegah ketergantungan pada kebajikan personal. Pendidikan kepemimpinan perlu memadukan moral, ekonomi politik, hukum, data, dan keterampilan deliberasi.

Harapan demokratis harus bersifat kritis. Optimisme tanpa diagnosis melahirkan kepuasan diri; pesimisme total menguntungkan pihak yang berkuasa karena warga menarik diri. Harapan kritis mengakui bahwa perubahan bertahap, reversibel, dan penuh konflik. Ia menilai kemenangan bukan hanya dari pergantian tokoh, tetapi dari apakah akses informasi meluas, organisasi warga menguat, keputusan lebih dapat diperiksa, dan kelompok rentan memperoleh kemampuan bersuara.

21. Agenda Reformasi: Mendemokratisasi Sumber Daya Kekuasaan

Agenda pertama adalah pembiayaan politik yang transparan. Semua sumbangan dan pengeluaran signifikan perlu dilaporkan cepat dalam format terbuka, dikaitkan dengan pemilik manfaat, dan diaudit independen. Dana publik bagi partai harus meningkat secara bertahap dengan syarat demokrasi internal, pendidikan kader, keterwakilan perempuan, laporan keuangan, serta sanksi yang benar-benar diterapkan. Pengeluaran pihak ketiga dan iklan digital harus masuk pengawasan.

Agenda kedua adalah demokratisasi partai. Prosedur pencalonan harus memiliki kriteria yang diketahui anggota, jalur keberatan, dan dokumentasi. Musyawarah atau pemilihan internal perlu mencegah kontrol personal absolut. Masa jabatan pengurus, konflik kepentingan keluarga, serta rangkap jabatan perlu diatur. Partai programatik memerlukan unit riset dan hubungan berkelanjutan dengan konstituen, bukan hanya mesin pemilu.

Agenda ketiga adalah keterbukaan pengaruh. Indonesia memerlukan aturan lobi yang mengakui bahwa advokasi kepentingan adalah bagian demokrasi, tetapi mewajibkan registrasi, agenda pertemuan, posisi kebijakan, dan masa jeda revolving door. Konsultasi legislasi harus menyediakan naskah tepat waktu, matriks tanggapan, serta alasan penerimaan atau penolakan masukan. Pemilik manfaat perusahaan dan konflik kepentingan pejabat harus dapat ditelusuri.

Agenda keempat adalah penguatan akuntabilitas. Independensi pengadilan, audit, lembaga antikorupsi, ombudsman, komisi informasi, dan pengawas pemilu harus dijaga melalui seleksi kredibel dan anggaran memadai. Perlindungan jurnalis, akademisi, pembela lingkungan, pelapor, serta warga pengkritik merupakan indikator kesehatan demokrasi. Kriminalisasi kritik menimbulkan efek gentar yang jauh melampaui satu perkara.

Agenda kelima adalah demokratisasi ekonomi. Pajak yang adil, persaingan usaha, akses pembiayaan UMKM, perlindungan pekerja, reforma agraria yang sah, pelayanan dasar, dan jaminan sosial mengurangi ketergantungan warga pada patron. Kebijakan redistributif bukan hanya hasil demokrasi; ia memperkuat prasyarat demokrasi. Warga yang aman secara sosial lebih mampu menolak pembelian suara dan mengambil risiko bersuara.

Agenda keenam adalah pembangunan kapasitas pengetahuan publik. Data pemerintah harus terbuka, akurat, dapat dibandingkan, dan disertai dokumentasi. Kampus perlu menjaga independensi riset, mengungkapkan sumber dana, serta menerjemahkan temuan ke bahasa publik. Media memerlukan model pendanaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemilik besar atau

iklan platform. Pendidikan kewargaan harus mengajarkan cara membaca anggaran, regulasi, statistik, dan konflik kepentingan.

Agenda ketujuh adalah inovasi partisipasi. Musyawarah warga, participatory budgeting, konsultasi daring, forum sektoral, dan citizen assembly dapat melengkapi pemilu. Desain harus memastikan representasi kelompok yang jarang hadir, informasi seimbang, fasilitasi independen, dan hubungan jelas dengan keputusan. Partisipasi tanpa daya pengaruh hanya menjadi ritual; keputusan tanpa partisipasi kehilangan pengetahuan lokal.

Reformasi harus dipahami sebagai perubahan ekosistem. Satu undang-undang tidak akan membongkar oligarki karena aktor dapat berpindah saluran. Transparansi tanpa organisasi warga menghasilkan data yang tidak digunakan; penegakan tanpa reformasi pembiayaan menghasilkan pelaku baru; desentralisasi tanpa pengawasan melokalkan rente. Strategi yang efektif menggabungkan institusi, insentif, kapasitas, dan budaya demokratis.

22. Skenario Masa Depan Demokrasi Indonesia

Skenario pertama adalah konsolidasi oligarkis. Pemilu tetap rutin, tetapi kompetisi menyempit, koalisi sangat besar, media terkonsentrasi, dan ruang kritik menurun. Kebijakan dapat tetap menghasilkan pertumbuhan, namun distribusi akses makin bergantung pada jaringan. Stabilitas jangka pendek dibayar dengan inovasi politik rendah dan ketidakpercayaan publik. Krisis kemudian berisiko muncul secara mendadak karena kanal koreksi melemah.

Skenario kedua adalah fragmentasi populis. Ketidakpuasan terhadap elite mendorong pemimpin yang menjanjikan hubungan langsung dengan rakyat. Program sosial dan nasionalisme ekonomi menguat, tetapi institusi pengawasan dianggap menghambat. Koalisi antara populisme dan modal besar dapat mempertahankan konsentrasi kekuasaan sambil mengganti bahasa legitimasi. Polarisasi identitas mengalihkan energi dari reformasi struktural.

Skenario ketiga adalah demokrasi kompetitif namun transaksional. Pergantian elite tetap mungkin, kebebasan relatif bertahan, dan inovasi daerah muncul, tetapi biaya politik serta patronase tidak berubah. Sistem ini cukup adaptif untuk menghindari keruntuhan, namun sulit menghasilkan reformasi jangka panjang. Kebijakan menjadi rangkaian kompromi jangka pendek.

Skenario keempat adalah demokrasi inklusif dan berkapasitas. Partai lebih terbuka, pembiayaan transparan, lembaga hukum kuat, ekonomi lebih kompetitif, pelayanan universal berkembang, dan partisipasi warga terhubung dengan keputusan. Elite tetap ada—karena masyarakat kompleks memerlukan kepemimpinan dan keahlian—tetapi sirkulasinya lebih terbuka dan kekuasaannya dapat diawasi. Ini bukan utopia tanpa konflik, melainkan tata kelola konflik yang adil.

Arah masa depan tidak ditentukan oleh satu pemilu. Ia dibentuk oleh akumulasi keputusan mengenai sekolah, pajak, data, kebebasan pers, rekrutmen partai, pengadaan, peradilan, dan organisasi warga. Setiap reformasi kecil dapat memperbesar kapasitas koreksi; setiap pengecualian

bagi aktor kuat dapat menjadi presiden. Demokrasi bertahan melalui kebiasaan institusional, bukan hanya deklarasi.

23. Kesimpulan

Struktur kekuasaan Indonesia merupakan hasil pertemuan demokrasi elektoral, warisan historis, kapitalisme, negara administratif, identitas sosial, dan organisasi masyarakat. Oligarki menjelaskan konsentrasi sumber daya material dan strategi mempertahankannya. Teori elite menjelaskan mengapa minoritas pengarah muncul dalam organisasi kompleks. Konsep rakyat mengingatkan bahwa legitimasi dan potensi koreksi tetap berasal dari warga, meskipun kapasitas mereka tidak setara.

Reformasi 1998 mengubah Indonesia secara mendasar: kekuasaan lebih terbuka, kompetisi meluas, kebebasan bertambah, dan pusat-pusat pengawasan berkembang. Namun demokratisasi jabatan tidak otomatis menjadi demokratisasi kekayaan, informasi, organisasi, dan akses. Jaringan lama beradaptasi; jaringan baru muncul. Karena itu, Indonesia bukan sekadar demokrasi palsu atau demokrasi sempurna, melainkan arena hibrida yang terus diperebutkan.

Bahaya terbesar analisis oligarki adalah fatalisme. Jika oligarki dianggap mahakuasa, partisipasi tampak sia-sia dan semua aktor dipukul rata. Sebaliknya, bahaya analisis prosedural adalah kepuasan diri: selama pemilu berlangsung, ketimpangan pengaruh dianggap tidak penting. Posisi yang lebih produktif mengakui kedalaman struktur sekaligus ruang agensi. Elite terpecah, institusi memiliki otonomi relatif, dan rakyat dapat membangun kekuatan melalui organisasi serta pengetahuan.

Pertanyaan normatif akhirnya bukan apakah Indonesia dapat hidup tanpa elite, melainkan elite macam apa yang terbentuk, bagaimana mereka direkrut, kepentingan siapa yang mereka layani, dan mekanisme apa yang membatasi mereka. Demokrasi berkualitas tidak menghapus kekuasaan; ia menyebarkan sumbernya, membuka akses, memperjelas tanggung jawab, dan memungkinkan keputusan salah diperbaiki tanpa kekerasan. Negara yang kuat bukan negara yang kebal kritik, melainkan negara yang mampu bertindak sekaligus mau dikoreksi. Rakyat yang berdaulat bukan sekadar pemilih yang dipanggil lima tahun sekali, melainkan warga yang memiliki kapabilitas untuk mengetahui, berbicara, berorganisasi, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama.

Glossarium

Istilah	Definisi
Akuntabilitas	Kewajiban pemegang kekuasaan menjelaskan tindakan, menerima pemantauan, dan menanggung konsekuensi.
Civil society	Ruang organisasi sukarela di luar negara dan pasar yang mengartikulasikan kepentingan serta mengawasi kekuasaan.
Dinasti politik	Reproduksi jabatan dan pengaruh politik melalui jaringan keluarga.

Elite	Kelompok yang memiliki pengaruh tidak seimbang karena posisi, or pengetahuan, modal, atau jaringan.
Elite capture	Keadaan ketika elite membelokkan proses atau manfaat kebijakan kepentingannya.
Kartelisasi partai	Kolaborasi partai-partai mapan untuk mengakses sumber daya neg membatasi kompetisi.
Klientelisme	Pertukaran dukungan politik dengan manfaat material atau akses yang personal dan bersyarat.
Konflik kepentingan	Keadaan ketika tugas publik berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, atau bisnis.
Oligarki	Konsentrasi kekuasaan pada sedikit aktor, terutama melalui penguasaan daya material dan pertahanan kekayaan.
Orang kuat lokal	Aktor daerah yang menggabungkan pengaruh ekonomi, sosial, pol terkadang koersif.
Patronase	Distribusi sumber daya, jabatan, atau manfaat untuk membangun loyalita
Pemilik manfaat	Orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau menerima man suatu badan hukum.
Populisme	Logika politik yang membelah masyarakat antara rakyat yang dianggap aut elite yang dianggap korup.
Regulatory capture	Dominasi kepentingan pihak yang diatur terhadap lembaga atau proses per
Revolving door	Perpindahan individu antara jabatan publik dan sektor yang sebelum kemudian diaturnya.
Rule of law	Prinsip bahwa kekuasaan tunduk pada hukum yang adil, dapat dipred diterapkan setara.
State capture	Pengaruh sistematis kepentingan privat terhadap pembentukan atur negara.
Teknokrasi	Peran dominan keahlian teknis dan profesional dalam perumusan kebijak

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2013). A nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>

- Buehler, M. (2013). Married with children: The second round of local direct elections and democratic politics in Indonesia. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of democratisation in Indonesia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814279918-014>
- Choi, N. (2009). Democracy and patrimonial politics in local Indonesia. *Indonesia*, 88, 131–164. <https://doi.org/10.5728/indonesia.88.0131>
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804773522>
- Indrawan, J. (2025). Oligarchy and dynastic politics in Indonesia. *International Governance Journal*.
- Kenawas, Y. C. (2023). The iron law of political dynasties in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(3), 799–818. <https://doi.org/10.1177/20578911221127563>
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353>
- Michels, R. (1915). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. Hearst's International Library.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Mosca, G. (1939). *The ruling class*. McGraw-Hill.
- Platteau, J.-P., & Gaspart, F. (2003). The risk of resource misappropriation in community-driven development. *World Development*, 31(10), 1687–1703. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00138-4](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00138-4)
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon. <https://doi.org/10.4324/9780203401453>
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia*, 78, 61–92. <https://doi.org/10.2307/3351288>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806>

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11–33.
<https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>

World Bank. (2016). Indonesia's rising divide. World Bank. <https://doi.org/10.1596/24765>